



Definisi Konseptual *E-Government* dan *E-Governance* : Analisis Komparatif

Erinda Alfiani Fauzi¹, Nike Purnamawati²

Universitas Palangka Raya¹, Universitas Lambung Mangkurat²

E-mail: erindafauzi@fisip.upr.ac.id

Article Info

Keywords:

e-government, e-governance, conceptual definition

Received 15/06/2025

Accepted 19/06/2025

Available online 30/06/2025

Abstract

This research examines the conceptual distinctions between e-government and e-governance through comprehensive literature analysis. Although these terms are often used interchangeably, there are fundamental differences in their conceptual foundations, scope, and practical implications. The findings reveal that e-government tends to focus on technical and administrative aspects of technology implementation in government, while e-governance encompasses a broader perspective on the transformation of relationships between government, citizens, and other stakeholders. This research proposes an integrated conceptual framework that positions both concepts along a continuum of digital government development. The findings provide necessary conceptual clarification for theoretical development and practical implementation in the field of digital public administration, while encouraging a more holistic approach to understanding digital government transformation.

A. PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, transformasi penyelenggaraan pemerintahan melalui integrasi teknologi informasi telah menjadi kebutuhan di seluruh dunia. Konsep *e-government* dan *e-governance* hadir sebagai wujud modernisasi dalam proses birokrasi pemerintah yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan aksesibilitas layanan pemerintahan. Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal cakupan, pendekatan, dan implementasi.

E-government pada umumnya mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional

pemerintahan(Palvia & Sharma, 2007). Sementara itu, *e-governance* memiliki dimensi yang lebih luas dengan melibatkan interaksi antara pemerintah, warga negara, dan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan(Dawes, 2008). Analisis perbandingan terhadap kedua konsep ini penting untuk memahami bagaimana teknologi digital tidak hanya mengubah mekanisme penyampaian sektor pelayanan publik, tetapi juga mengubah hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pemberian hak dasar kepada masyarakat.

Penelitian ini akan mengkaji perbedaan konseptual antara *e-government* dan *e-governance* melalui tinjauan literatur dan indikator masing-masing subjek(Bannister & Connolly, 2012; United Nations, 2020). Pemahaman mendalam mengenai perbedaan ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual yang kuat bagi pengembangan kebijakan, implementasi sistem pemerintahan elektronik bahkan untuk mempermudah pengambilan indikator yang relevan untuk mengkaji kedua subjek yang ada.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *literature review* sebagai metode utama untuk mengidentifikasi, mengkaji secara kritis, serta menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan topik yang menjadi fokus kajian. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan metodologis bahwa literature review mampu memberikan landasan teoritis yang kuat serta pemahaman yang komprehensif terhadap perkembangan keilmuan di bidang yang diteliti (Snyder, 2019). penggunaan metode ini diharapkan dapat memperkaya analisis konseptual dan memberikan kontribusi yang substansial terhadap pengembangan teori maupun praktik dalam bidang kajian yang dibahas.

C. HASIL DAN DISKUSI

1. Definisi Konseptual *E-government*

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik, meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Maka berikut definisi konseptual dari literature review penelitian terdahulu. Menurut World Bank (2015), *e-government* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah yang memiliki kemampuan untuk

mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya.

Selanjutnya menurut UNDP (2012) mendefinisikan *e-government* sebagai aplikasi TIK oleh lembaga pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja, mendorong transparansi, dan memberikan layanan publik yang lebih baik. Defini konseptual dari penelitian Ndou (2004) menyatakan bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi, khususnya aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan pengiriman layanan pemerintah kepada warga negara, mitra bisnis, karyawan, dan entitas pemerintah lainnya.

Definisi konseptual didukung dengan beberapa indikator-indikator yang digunakan dalam implementasi pelaksanaan *e-government*. Menurut penelitian yang dikemukakan oleh Layne & Lee (2001), indikator perkembangan *e-government* meliputi:

1. ketersediaan dan aksesibilitas informasi secara online
2. kemampuan yang dimiliki dalam melakukan interaksi elektronik
3. Integrasi vertikal yang menghubungkan berbagai tingkatan pemerintahan
4. Integrasi horizontal yang menghubungkan antar tingkatan pemerintah

E-government yang efektif dan efisien memerlukan keseimbangan antara pengelolaan teknologi, proses administratif, dan kebijakan publik dengan Indikator sebagai berikut yang dijelaskan oleh Dawes (2008) :

1. Kualitas kebijakan
2. kerangka hukum
3. Efektivitas struktur manajemen
4. Desain sistem informasi
5. Standarisasi Sistem
6. Mekanisme koordinasi antar lembaga
7. Nilai dalam penggunaan teknologi

Maka untuk optimalisasi proses implementasi E-Government maka diperlukan konsep *open government* yang kuat. konsep *open government* ini melampaui batasan tradisional *e-government* dengan menitikberatkan pada keterbukaan proses pemerintahan, perluasan akses terhadap informasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam aktivitas pemerintahan (Meijer et al., 2012).

Adapun indikator *open government* dalam e-government menurut Meijer et al. (2012) adalah sebagai berikut :

1. Tingkat keterbukaan data dan informasi
2. Mekanisme partisipasi publik dalam pengambilan keputusan
3. Platform kolaborasi antara pemerintah, warga, dan sektor privat
4. Budaya organisasi yang mendukung keterbukaan.

2. Definisi Konseptual *E-governance*

E-governance memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan e-government. E-governance mencakup interaksi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya melalui penggunaan TIK untuk memfasilitasi partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, pengawasan, dan tata kelola pemerintahan. Maka berikut definisi konseptual dari literature review penelitian terdahulu. UNESCO (2011) mendefinisikan e-governance sebagai "penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh berbagai aktor dalam masyarakat dengan tujuan meningkatkan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan untuk mempromosikan tata kelola yang lebih inklusif, partisipatif dan kolaboratif."

Menurut Palvia & Sharma (2007) *e-governance* adalah konsep yang lebih luas dan mencakup keseluruhan tata kelola termasuk *e-democracy*, *e-voting*, dan partisipasi publik online untuk memfasilitasi proses tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Selanjutnya menurut Dawes (2008) melihat *e-governance* sebagai penggunaan strategis TIK untuk mentransformasi cara warga negara berpartisipasi dalam demokrasi dan mengubah relasi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat.

Beberapa indikator yang mendukung definisi konseptual tentang *e-governance* diatas adalah *e-governance* menurut Pereira et al. (2018) konsep *smart governance yang termasuk didalamnya pengembangan e-governance* tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data. Mereka mengidentifikasi beberapa indikator utama dalam penerapan *smart governance*, yaitu:

1. pengambilan keputusan berbasis data dan bukti
2. kolaborasi dan keterlibatan pemangku kepentingan

3. transformasi internal berbasis TIK
4. partisipasi warga dan penerapan prinsip pemerintahan terbuka
5. promosi kreativitas, kewirausahaan, serta penguatan kesetaraan sosial
6. integrasi prinsip keberlanjutan dan ketahanan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan

Selanjutnya indikator yang mendukung definisi konseptual tentang *e-governance*, Indikator yang diidentifikasi Gil-García dan Pardo (2005) meliputi:

1. Kualitas infrastruktur teknologi
2. Kesesuaian dengan struktur organisasi
3. Dukungan politik dan regulasi
4. Kesiapan sumber daya manusia
5. Keselarasan dengan konteks sosial-ekonomi

3. Analisis Komparatif antara *E-Government* dan *E-Governance*

E-Government secara konseptual didasarkan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan publik. Sedangkan, *E-Governance* memiliki konsep yang lebih luas yang mencakup transformasi relasi kekuasaan dan partisipasi dalam proses tata kelola. Konsep ini lebih menekankan pada dimensi sosio-politik dari penggunaan TIK dalam pemerintahan. Untuk menjelaskan analisis komparatif dari definisi konseptual antara *e-government* dan *e-governance* :

Tabel 1. analisis komparatif dari definisi konseptual antara *e-government* dan *e-governance*

| Dimensi | E-Government | E-Governance |
|-------------------------|--|---|
| Definisi | Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan publik | <i>Meningkatkan partisipasi dan membantu proses tata kelola pemerintah yang inklusif</i> |
| Fokus dan Tujuan | Berfokus pada aspek teknis dan administratif dari digitalisasi pemerintahan | Berfokus pada transformasi relasi kekuasaan dan partisipasi dalam proses tata kelola |
| Cakupan | Sempit dan spesifik: aplikasi teknologi dalam proses administratif dan penyediaan layanan publik | Luas: mencakup seluruh ekosistem tata kelola termasuk e-democracy, e-voting, dan partisipasi publik |

| Dimensi | E-Government | E-Governance |
|------------------------------|--|---|
| Media | Formal dan terstruktur: portal layanan online, sistem administrasi elektronik, database terintegrasi | Beragam dan dinamis: forum diskusi, platform konsultasi publik, e-voting, mekanisme umpan balik warga |
| Prioritas Kebijakan | Fokus pada infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas SDM, standardisasi, integrasi sistem | Pendekatan holistik: teknologi, reformasi kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perubahan budaya organisasi |
| Indikator Utama | Efisiensi, efektivitas, transparansi dalam operasi pemerintah, dan peningkatan kualitas layanan | Partisipasi, inklusivitas, kolaborasi, dan pemberdayaan warga |
| Hambatan Implementasi | Teknis dan administratif: infrastruktur TIK, interoperabilitas, keamanan data, literasi digital | Sosial dan politik: partisipasi inklusif, kesenjangan partisipasi digital, kepercayaan publik, dampak partisipasi |
| Tingkat Keberhasilan | Efisiensi proses, penghematan biaya, tingkat penggunaan layanan, kepuasan pengguna | Tingkat partisipasi warga, inklusivitas, dampak pada kebijakan, kepercayaan pada pemerintah |

Sumber : Diolah Penulis, 2025

D. KESIMPULAN

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa meskipun *e-government* dan *e-governance* saling terkait, keduanya memiliki perbedaan konseptual yang signifikan dalam hal definisi, fokus, tujuan, cakupan, media prioritas kebijakan, indikator utama, hambatan implementasi serta tingkat keberhasilan masing-masing subjek. *E-government* lebih berfokus pada aspek teknis dan administratif dari digitalisasi pemerintahan, sementara *e-governance* mencakup transformasi yang lebih luas dalam proses tata kelola dan relasi antara pemerintah dan masyarakat. Maka perbedaan konseptual ini penting untuk pengembangan strategi digital yang efektif dalam sektor publik yang tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi tetapi juga memperkuat nilai-nilai demokratis dan tata kelola yang baik. Pendekatan yang paling efektif mungkin adalah yang mengintegrasikan elemen-elemen dari kedua konsep ini untuk mencapai transformasi digital yang komprehensif dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Penelitian

- Bannister, F., & Connolly, R. (2012). Defining e-governance. *E-Service Journal*, 8(2), 3–25.
- Dawes, S. S. (2008). The Evolution and Continuing Challenges of E-Governance. *Public Administration Review*, 68(s1). <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2008.00981.x>
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136. [https://doi.org/10.1016/s0740-624x\(01\)00066-1](https://doi.org/10.1016/s0740-624x(01)00066-1)
- Meijer, A. J., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: Connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 10–29.
- Ndou, V. (2004). E-government for developing countries: Opportunities and challenges. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 18, 1–24.
- Palvia, S. C. J., & Sharma, S. S. (2007). E-government and e-governance: Definitions/domain framework and status around the world. In *International Conference on E-governance* (pp. 1–12).
- Pereira, G. V, Parycek, P., Falco, E., & Kleinhans, R. (2018). Smart governance in the context of smart cities: A literature review. *Information Polity*, 23(2), 143–162.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- United Nations. (2020). E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. *United Nations Department of Economic and Social Affairs*.